

Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Pidie

Darwin

Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pidie

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie

Email: darwinpeudaya@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Kabupaten Pidie. Metode yang digunakan dalam artikel ini merupakan studi literatur yang bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal dan kepustakaan lainnya yang relevan dengan kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan lembaga pendidikan Islam Pidie berjalan beriringan dengan perubahan-perubahan pada lembaga pendidikan di Indonesia secara umum karena Pidie merupakan bagian integral dari negara kesatuan republik Indonesia. Lembaga pendidikan Islam di Pidie secara bertahap berubah menjadi lembaga pendidikan modern, tetapi tetap mempertahankan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam warisan sejarah Aceh. Sehingga, meskipun madrasah telah eksis dan mendominasi sebagai lembaga pendidikan Islam, namun setiap anak yang lahir di Aceh masih tetap mengenyam pendidikan di meunasah dan dayah-dayah tradisional yang tersebar di seluruh Gampong yang ada di Aceh.

Kata kunci: *Lembaga, Pendidikan, Islam, Pidie*

Abstract

This article aims to describe the development of Islamic Education Institutions in the Pidie Regency. The method used in this article is a literature study, and data sourced from books, journals, and other literature relevant to this study. The results of the study show that the development of Pidie Islamic educational institutions goes hand in hand with changes in educational institutions in Indonesia in general because Pidie is an integral part of the unitary state of the Republic of Indonesia. Islamic educational institutions in Pidie are gradually turning into modern educational institutions, but still, maintain their identity as an Islamic educational institution inherited from Aceh's history. Thus, even though madrasahs exist and dominate as Islamic educational institutions, every child born in Aceh still receives an education in Meunasah and Dayah throughout all Gampong in Aceh.

Keywords: *Institution, Education, Islam, Pidie*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, mendefinisikan pendidikan sebagai “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pengertian tersebut memberikan mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan usaha untuk mencapai cita-cita mulia suatu bangsa (Ikramatoun et al., 2021). Sejarah membuktikan bahwa bangsa-bangsa dan peradaban besar masa lalu yang pernah maju dan unggul didunia seperti peradaban Romawi, Yunani, hingga peradaban Islam disebabkan oleh pendidikannya yang maju. Hal ini tentu dapat dipahami karena jika pendidikan berkualitas, maka akan lahir masyarakat dan bangsa yang juga berkualitas. Demikian pula sebaliknya, ketika pendidikan tidak berkualitas, maka akan lahir masyarakat yang kehidupannya jauh dari standar hidup bangsa yang cerdas dan berkualitas. Itulah mengapa para pendiri bangsa ini menetapkan salah satu amanah dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” (Solihin, 2015).

Melihat begitu pentingnya pendidikan, maka tidak heran ketika Amerika tertinggal dari Uni Soviet dalam bidang teknologi ruang angkasa pada tahun 1957, J.F. Kennedy kala itu bertanya “*What’s wrong with American classroom?*”. Pertanyaan sederhana ini kemudian memicu lahirnya pembaharuan pendidikan di Amerika masa itu. Demikian pula dengan Kaisar Jepang yang dengan penuh kekhawatiran bertanya berapa guru yang masih hidup sesaat setelah bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian Ho Chi Min selaku bapak pendidikan Vietnam juga pernah mengatakan bahwa tanpa guru tidak akan ada pendidikan, tanpa pendidikan tidak akan ada ekonomi dan pembangunan (Ikramatoun et al., 2021).

Untuk konteks Indonesia, peran penting pendidikan dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga pendidikan. Kata lembaga secara fisik dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *institute* yang berarti sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan secara non-fisik disebut dengan kata

institution yang bermakna suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa baik secara fisik maupun non fisik lembaga memiliki makna yang koheren dan sekaligus menjadi sarana pencapaian tujuan. Dalam konteks Indonesia, ketika kata lembaga dan kata pendidikan di padukan maka dapat dipahami maknanya sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam undang-undang Sisdiknas.

Terlepas dari pada itu, di Indonesia lembaga pendidikan seringkali didikotomikan yaitu antara lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan umum merupakan lembaga pendidikan yang bernaung pada kementerian pendidikan, sedangkan lembaga pendidikan Islam adalah lembaga pendidikan yang bernaung pada kementerian agama. Dikotomi ini kemudian berlanjut pada pemberian nama lembaga pendidikan yaitu sekolah untuk lembaga pendidikan umum dan madrasah untuk pendidikan agama dan hal ini terjadi dari jenjang pendidikan paling rendah hingga ke perguruan tinggi. Menurut Mustaqim (2015) dikotomi ini bermula dari masuknya pendidikan ala belanda ke Indonesia yang bercorak barat. Pendidikan sekolah yang bercorak barat tersebut sangat berbeda dengan pendidikan Islam Indonesia yang tradisional, bukan saja dari segi metode, tetapi lebih khusus dari isi dan tujuannya. Pendidikan yang dikelola oleh Belanda khususnya berpusat pada pengetahuan umum dan keterampilan duniawi. Adapun lembaga pendidikan Islam lebih ditekankan pada pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi pengamalan ajaran agama.

Jauh sebelum kedatangan Belanda membawa lembaga pendidikan modern ala barat, di Indonesia sudah ada lembaga pendidikan tradisional yang kemudian menjadi embrio lembaga pendidikan Islam. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, lembaga pendidikan tradisional yang erat asosiasinya dengan lembaga pendidikan Islam telah lama eksis. Mustaqim (2015) dalam kajian menyebutkan bahwa dari catatan sejarah, lembaga pendidikan pesantren tertua adalah Pesantren Tegalsari di Ponorogo, yang didirikan pada tahun 1724. Namun, sekitar seabad kemudian, yakni melalui survei Belanda pada tahun 1819, tampak sekali bahwa pesantren tumbuh dan berkembang secara sangat pesat, terutama di seluruh pelosok pulau Jawa. Survei itu melaporkan bahwa lembaga pendidikan pesantren sudah terdapat di Priangan, Pekalongan, Rembang, Kedu, Surabaya, Madiun, dan

Ponorogo. Islamis asal Belanda, Martin van Bruinessen, yakin bahwa sebelum abad ke-18 atau sebelum berdirinya Pesantren Karang, belum ada lembaga yang layak disebut pesantren. Yang ada hanyalah tempat pengajaran perorangan atau tidak terstruktur.

Selain perkembangan lembaga pendidikan Islam tradisional di Jawa yang kemudian menjadi basis perkembangan lembaga pendidikan Islam modern saat ini, di Aceh juga sudah terlebih dahulu eksis lembaga pendidikan tradisional yang dikenal dengan sebutan Dayah. Menurut Snouck Hurgronje sebagaimana dikutip oleh Marzuki (2011) Dayah (bahasa Aceh) adalah nama lembaga yang dikenal dengan sebutan pesantren di Jawa atau surau di Padang atau pondok di Thailand. Kata Dayah ini berasal dari bahasa Arab “zawiyah”. Istilah zawiyah, secara literal bermakna sudut, yang diyakini oleh masyarakat Aceh pertama kali digunakan sudut mesjid Medinah ketika Nabi memberi pelajaran kepada para sahabat di awal Islam. Orang-orang ini, sahabat Nabi kemudian menyebarkan Islam ke tempat-tempat lain.

Dalam perkembangannya, selain pengaruh kelembagaan nasional, lembaga pendidikan dayah di Aceh ini menjadi tonggak perkembangan lembaga pendidikan Islam modern di Aceh, termasuk lembaga pendidikan Islam di kabupaten Pidie. Secara sosiologis dan historis, eksistensi lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di Aceh dan Pidie tersebut tidak lepas dari tumbuh kembangnya lembaga pendidikan tradisional dari sejak masa kerajaan Aceh. Termasuk pula pengaruh konteks sosio historis masyarakat Aceh dari masa kerajaan hingga saat ini. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang perkembangan lembaga pendidikan Islam di Aceh, khususnya di Pidie Dengan memenuhi tujuan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang eksistensi sekaligus perkembangan kehadiran Lembaga Pendidikan Islam bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Kabupaten Pidie.

B. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur yaitu suatu kegiatan mendalami, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang didasarkan pada hasil penelitian atau kajian yang sudah dilakukan sebelumnya (Fitrah & Luthfiyah, 2018). Menurut Creswell (2016) studi literatur merupakan upaya yang dilakukan

peneliti untuk memperoleh dan menghimpun segala informasi tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, data dalam tulisan ini bersumber kajian literatur berupa buku-buku, jurnal dan artikel lainnya yang relevan. Dengan menggunakan metode ini penulis mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia, Aceh, dan Pidie, kemudian mendeskripsikan dan menarik korelasinya dengan kondisi pendidikan di Pidie saat ini.

C. PEMBAHASAN

Secara umum, lembaga pendidikan Islam pada dasarnya dapat dirujuk dari awal kemunculan Islam karena penyebaran Agama Islam pada periode awal sejatinya jua melalui mekanisme pendidikan. Pada masa Nabi Muhammad saw, wahyu-wahyu yang diterima kemudian disampaikan dan diajarkan oleh Nabi kepada karib kerabatnya dan teman sejawatnya secara sembunyi-sembunyi. Setelah pemeluk Islam semakin bertambah Nabi kemudian mengajarkan Islam dalam suatu pertemuan bersama para sahabatnya yaitu di rumah Al Arqam bin Abil Arqam. Rumah ini kemudian menjadi tempat pertama pendidikan Islam, dan di sanalah Nabi mengajarkan dasar-dasar atau pokok-pokok agama Islam kepada sahabat-sahabatnya dan membacakan wahyu-wahyu (ayat-ayat) Alquran kepada para pengikutnya serta Nabi menerima tamu dan orang-orang yang hendak memeluk agama Islam atau menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Ketika turun wahyu yang memerintahkan Nabi untuk menyiarkan agama Islam secara terang-terangan, Nabi mendapatkan banyak rintangan sehingga harus hijrah ke Madinah. Setelah Hijrah ke Madinah nabi melanjutkan menyiarkan agama Islam. Di Madinah nabi tidak hanya fokus pembinaan tauhid, namun juga melakukan pembinaan sosial dan politik (Hafiddin, 2015). Kesuksesan Rasulullah di dalam mendidik tidak hanya dalam keluarga, bahkan para sahabat kala itu juga mendapatkan pendidikan dan bimbingan Rasulullah di berbagai forum. Dan yang paling populer di dalam beberapa literasi tentang sejarah pendidikan di masa Rasulullah, adalah dilaksanakan di Serambi (Suffah) masjid yang kemudian di sebut dengan Ashabus Suffah (Rahman, 2018).

Setelah Rasulullah SAW wafat, kegiatan pendidikan Islam terus berlanjut. Pada masa Abu bakar, aspek pendidikan tidak terlalu menjadi skala prioritas karena

masa itu terdapat beberapa wilayah ingin melepaskan diri dari pemerintahan dengan anggapan bahwa keterkaitannya dengan Islam sudah tidak ada lagi ketika Rasulullah wafat. Pada masa ini munculnya kaum yang murtad, munculnya nabi palsu, timbulnya pembangkang zakat secara masal. Kondisi tersebut mulai bergeser pada Khalifah kedua di mana pendidikan lebih maju karena kondisi politik dan masyarakat relatif stabil dan banyak orang datang dari luar untuk belajar di Madinah. Pada masa Khalifah Usman, kondisi sosial politik kembali tidak stabil, muncul pemberontakan di beberapa wilayah sehingga situasi politik semakin memanas yang berakhir dengan terbunuhnya khalifah Utsman. Pola pendidikan pada masa Utsman tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya, namun kesempatan untuk pendidikan terbuka lebar karena para sahabat senior tidak hanya menetap di Madinah namun juga bebas keluar kota Madinah untuk mengajar. Pada masa Khalifah keempat kondisi sosial politik semakin tidak stabil dan kondisi tersebut membuat pendidikan stagnan. (Badwi & Al-rasyidin, 2017).

Dalam perkembangan selanjutnya, melalui pendidikan Islam kemudian diterima secara luas meski dalam prosesnya terdapat konflik-konflik berdarah. Perkembangan pendidikan Islam kemudian mencapai puncaknya pada masa dinasti Umayyah di Cordoba, Spanyol. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I, Cordoba disulap menjadi pusat perkembangan ilmu, pengetahuan, kesenian dan kesusastraan di seantero benua Eropa. Pada era kejayaan itu, Cordoba mengalami kemajuan pesat dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan intelektual. Pada masa kekuasaan Abdurrahman III, berdirilah Universitas Cordoba yang termasyhur dan menjadi kebanggaan umat Islam. Berbondong-bondong mahasiswa dari berbagai wilayah, termasuk mahasiswa Kristen dari Eropa menimba ilmu. Dari universitas inilah, Barat menyerap ilmu pengetahuan. Salah satu mahasiswa Kristen yang menuntut ilmu di Spanyol adalah Gerbert d'Aurillac (945-1003), yang kemudian menjadi Paus Sylvester II. Selepas belajar matematika di Spanyol, dia kemudian mendirikan sekolah katedral dan mengajarkan aritmetika dan geometri kepada para muridnya. Geliat pendidikan di Cordoba makin bersinar pada era pemerintahan Al-Hakam Al-Muntasir sehingga digelar Khalifah yang alim. Sebanyak 27 sekolah swasta berdiri pada masa itu. Gedung perpustakaan mencapai 70 buah menambah semarak perkembangan ilmu

pengetahuan. Jumlah pengunjungnya mencapai 400 ribu orang. Padahal, volume kunjungan perpustakaan besar di Eropa lainnya, kala itu, paling tinggi mencapai 1.000 orang. Saat itu, terdapat 170 wanita yang berprofesi sebagai penulis kitab suci Alquran dengan huruf Kufi yang indah. Anak-anak fakir miskin pun bisa belajar secara gratis di 80 sekolah yang disediakan Khalifah. (Republika, 2020).

1. Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia

Secara historis, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan sudah ada sebelum Islam masuk ke Indonesia. Menurut Rahman (2018), terdapat lembaga pendidikan Jawa kuno telah melakukan praktik pendidikan yang bernama pawiyatan dan konsep pawiyatan ini mirip dengan konsep pesantren di Jawa. Masuknya Islam ke nusantara membuat konsep pendidikan sedikit berubah namun pola yang digunakan masih sama yaitu kegiatan belajar mengajar. Ketika Islam sudah diterima secara luas di Indonesia, lembaga pendidikan Islam juga terus berkembang. Beberapa kajian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam secara perlahan berkembang sesuai dengan konteks sosial masyarakat.

Pada awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan Islam dilaksanakan secara informal, para mubalig melaksanakan penyiaran agama Islam kapan dan di mana saja pada setiap kesempatan dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Mereka mendirikan masjid sebagai tempat beribadah dan mengerjakan Shalat Jum'at di setiap desa yang dominan penduduknya muslim, mereka mendirikan surau (di Sumatera Barat) atau langgar untuk mengaji, membaca al-Qur'an dan sebagai tempat untuk mendirikan Shalat lima waktu. Di beberapa daerah di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan juga telah bermunculan lembaga pendidikan Islam lainnya. di Jawa populer dengan istilah pesantren. Menurut Bull (1977) sebagaimana dikutip oleh Rahman (2018), pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam pertama kali dirintis oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1399 M. Untuk menyebarkan agama Islam di Jawa dan tokoh yang berhasil mendirikan pesantren adalah Raden Rahmat (Sunan Ampel). Pertama kali didirikan pondok pesantren di kembang kuning yang waktu hanya memiliki tiga orang santri, setelah itu Raden Rahmat pindah ke Ampel Denta dan mendirikan pondok pesantren yang selanjutnya dikenal dengan Sunan Ampel.

Selanjutnya muncul pesantren-pesantren baru yang digagas oleh para santri dan putranya, seperti pondok pesantren Giri oleh Sunan Giri, Pondok Pesantren Demak oleh Raden Fatah, dan pondok pesantren tuban oleh Sunan Bonang. Fungsi pondok pesantren ini pada awalnya hanya sebagai media islamisasi yang memadukan tiga unsur, yakni: ibadah untuk menanamkan iman, tablig untuk menyebarkan Islam, dan ilmu serta amal untuk mewujudkan kegiatan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Ketika Islam Indonesia semakin intens berinteraksi dengan dunia luar seperti timur tengah, lembaga pendidikan Islam juga semakin berkembang hingga dikenal kemudian istilah madrasah. Rahman (2018) mencatat bahwa secara historis keberadaan madrasah merupakan perkembangan lebih lanjut dari keberadaan masjid dan pesantren. Madrasah pertama kali berdiri di Sumatra, Madrasah Adabiyah (1909, dimotori Syekh Abdullah Ahmad), tahun 1910 berdiri Madrasah Schoel di Batusangkar oleh Syaikh M. Taib Umar, kemudian M. Mahmud Yunus pada 1918 mendirikan Diniyah Schoel sebagai lanjutan dari Madrasah Schoel. Madrasah Tawalib didirikan Syeikh Abdul Karim Amrullah di Padang Panjang (1907). Lalu, Madrasah Nurul Uman di didirikan H. Abdul Somad di Jambi. Madrasah berkembang di Jawa mulai 1912. Ada model madrasah pesantren NU dalam bentuk Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha, dan Muallimin Ulya (mulai 1919); ada madrasah yang mengapropriasi sistem pendidikan Belanda plus, seperti Muhammadiyah (1912) yang mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsnawiyah, Muallimin, Muballighin, dan madrasah Diniyah. Ada juga model Al-Irsyad (1913) yang mendirikan madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Madrasah Tajhiziyah, Muallimin dan Tahassus; atau model madrasah PUI di Jabar yang mengembangkan madrasah pertanian (Farid, 2017)

Menurut penelitian Mahmud Yunus sebagaimana dikutip Kadir (2010), pendidikan Islam pertama kali memiliki kelas dan memakai bangku, meja, dan papan tulis adalah Madrasah Adabiyah (Adabiyah School) di Padang. Madrasah Adabiyah adalah madrasah pertama di Minangkabau, bahkan di Indonesia, didirikan oleh Syaikh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Madrasah ini hidup sampai tahun 1914, kemudian diubah menjadi HIS Adabiyah pada tahun 1915, yang merupakan HIS pertama di Minangkabau yang memasukkan pelajaran agama Islam

dalam pengajarannya. Munculnya sekolah-sekolah Islam yang terpadu dengan sistem pendidikan modern juga tak terlepas dari banyaknya alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang telah menyelesaikan pendidikannya di sana. Mereka adalah hasil dari sistem pendidikan yang telah direformasi oleh Muhammad Abduh. Setibanya di Indonesia, mereka mengelola dan mengajar di sekolah-sekolah agama serta memasukkan mata pelajaran umum. (Kadir, 2010). Selain itu, kemunculan madrasah juga dipengaruhi aspek historis lainnya yaitu munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 serta respons pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda masa itu. Respons ini adalah respons yang diberikan oleh masyarakat Indonesia khususnya umat Islam atas kebijakan-kebijakan pendidikan dari pemerintahan Hindia-belanda yang mempunyai misi untuk mendukung kristenisasi daerah koloni. Kebijakan inilah akhirnya yang memicu bangkitnya berbagai gerakan politik dan sosialnya di Indonesia. Salah satunya adalah gerakan Muhammadiyah. Salah satu responsnya adalah usaha untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam yang sebanding dengan sekolah ala Belanda dalam perkembangannya menjadi agenda dan gerakan Islam di Indonesia. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Jami'at Khair, Persatuan Umat Islam, Persatuan Islam, al-Irsyad, al-Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan organisasi Islam lainnya, memiliki bagian atau seksi khusus dalam rangka pendirian madrasah-madrasah di berbagai daerah. Dengan mendirikan madrasah, umat Islam agaknya telah memberikan respons yang cukup tepat terhadap kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda, sehingga pendidikan Islam di satu sisi tidak terlalu tertinggal, dan di sisi lain tetap mempertahankan ciri-ciri keislamannya secara kuat (Maftuh, 2009)

Setelah Indonesia merdeka hingga saat ini, lembaga pendidikan Islam menjadi semakin eksis dengan sistem pengelolaan yang semakin modern. Menurut Azra (2002) pesantren yang sudah tumbuh ratusan tahun, pada era kemerdekaan mendapat tempat untuk berkembang. Sedangkan sekolah terbagi menjadi dua, yaitu sekolah negeri dan swasta. Sekolah swasta ini juga terbagi menjadi dua yaitu sekolah Islam dan sekolah non Islam. Kemudian madrasah ini diberlakukan sejak SK 3 Menteri tahun 1975 yang berlangsung sampai 1990. SK 3 Menteri itu adalah Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan menteri Dalam Negeri, yang isinya adalah

sekolah madrasah memiliki persamaan dan kedudukan yang setara dengan sekolah, sehingga disebut madrasah itu adalah sekolah yang berciri khas Islam. Pendidikan Islam sebagai mata Pelajaran Pendidikan Islam secara formal telah dimasukkan ke sekolah-sekolah sejak tahun 1946, sejak dimulainya pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Terakhir tercantum dengan jelas dalam UUD No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan undang-undang tersebut, posisi pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional semakin mantap, baik pada lembaga pendidikan umum maupun keagamaan. Berdasarkan dari undang-undang tersebut bahwa perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam sudah baik di mana lembaga-lembaga tersebut sudah disetarakan dengan sekolah umum sehingga tidak lagi terdapat perbedaan antara satu lembaga dengan lembaga pendidikan lainnya (Posha, 2015).

2. Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Aceh

Secara umum lembaga pendidikan Islam di Aceh saat ini juga dipengaruhi oleh perkembangan lembaga pendidikan di Indonesia. Namun, sebagai daerah yang pertama berinteraksi dengan dunia Islam, Aceh memiliki sejarah tersendiri tentang lembaga pendidikan Islam. Jika dirujuk secara historis, perkembangan lembaga pendidikan Islam di Aceh memiliki kemiripan dengan pola pendidikan Islam awal pada masa Nabi di mana tradisi keilmuan Islam menyatu dengan proses islamisasi itu sendiri. Hal ini menurut Syadli (2003) dapat dibuktikan dengan timbulnya tradisi di kalangan sahabat yang belajar kepada Nabi, mula-mula di mesjid dan kemudian pindah ke Dar Al-Arqam. Dari tradisi seperti ini berkembanglah institusi pendidikan Islam. Dalam proses Islamisasi di Nusantara, tradisi seperti disebutkan di atas tampak jelas. Para Ulama yang datang menyebarkan agama Islam membuat satu kelompok Zawiyah di dalam mesjid. Dalam kelompok itu ia menyampaikan ajaran Islam atau mendiskusikan permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan ajaran Islam. Zawiyah ini didatangi oleh orang dewasa dan bahkan Sultan Malik Al-Saleh, raja Pasai, senang mengikuti pertemuan ini yang diadakan setiap sehabis Shalat Jum'at. Di samping itu perhatian raja-raja Aceh terhadap ilmu pengetahuan amat tinggi. Untuk kepentingan pengembangan intelektual, raja memanggil ulama untuk tinggal di istana. Di istana mereka mengadakan pertemuan-pertemuan dan diskusi keagamaan dan istana kerajaan menjadi pusat pengembangan intelektual

Islam. Dengan patronase penguasa kemudian memunculkan tokoh-tokoh ulama terkenal, seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri dan Abdur Rauf al-Singkili. Selanjutnya Zawiyah yang dalam dialek Aceh disebut "dayah", berkembang menjadi suatu institusi pendidikan formal. Dayah-dayah ini didirikan oleh ulama yang berada di Aceh. Mereka bukan saja ulama yang berasal dari Aceh sendiri, akan tetapi justru juga yang berasal dari luar nusantara, dari Mekah atau Gujarat. Dayah ini ternyata mampu melahirkan ulama yang terkenal bukan saja di tanah air, tetapi juga di dunia luar.

Dari literatur yang ada tidak menjelaskan secara nyata bentuk dan jenis pendidikan saat itu. Namun dapat diduga, bahwa bentuk pengajaran saat itu barulah berbentuk halaqah atau zawiyah, karena saat itu bentuk-bentuk seperti ini sangat berkembang di Masjidil Haram. Halakah ini diikuti oleh orang dewasa dengan duduk melingkar mengelilingi guru di pojok mesjid, mendengar ceramahnya serta mendiskusikan masalah-masalah yang timbul. Begitu diminatinya, halakah ini bukan lagi didatangi oleh orang dewasa saja, akan tetapi juga oleh anak-anak. Dari sini timbullah kebutuhan untuk memberikan pendidikan khusus bagi anak-anak dan lahirlah institusi pendidikan Islam di Aceh. Hasymi dalam Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh sebagaimana dikutip oleh Syadli (2003) mengelompokkan pendidikan Islam di Aceh menjadi 5 tingkatan yaitu meunasah, rangkang, dayah, dayah Tengku Cik, dan jami'ah. Adanya lembaga-lembaga pendidikan seperti ini sebelum perang Aceh menurut Marzuki (2011) dapat dilihat pada berbagai situs peninggalan sejarah yang banyak sekali dari lembaga tersebut, diantaranya Dayah Teungku Awe Geutah di Peusangan, Dayah Teungku Chik di Tiro (Syekh Saman), Dayah Teungku Chik Tanoh Abee di Seulimum, Dayah Teungku di Lamnyong, Dayah Lambhuek dan Dayah di Krueng Kalee. Salah satu sumber tertulis yang sampai kepada kita tentang pendidikan di Aceh sebelum perang adalah Hikayat Pocut Muhammad karya salah seorang ulama dan sastrawan yang diduga Tengku Lam Rukam.

Ketika perang melawan Belanda pada tahun 1873, dayah di Aceh memegang peran penting dalam pengerahan tenaga pejuang, terutama murid dan masyarakat di sekitar dayah ke medan peperangan. Dalam menumbuhkan semangat juang rakyat melalui motivasi keagamaan, seperti ajakan perang sabil, dayah

berperan sangat besar, karena itu tidak mengherankan jika pada akhir abad ke 19 banyak dayah yang terbengkalai akibat serangan Belanda yang menganggap dayah sebagai konsentrasi para pejuang, baru setelah perang mereda, para Teungku Chik atau para ulama berusaha membangun kembali dayah yang terlantar (Marzuki, 2011; Sufi & Wibowo, 20019). Pada saat itu semua dayah mengalihkan aktivitasnya ke arah perjuangan politik melawan Belanda di samping mengajarkan ilmu agama. Ketika Belanda menaklukkan Aceh, lembaga pendidikan dayah menjadi dwi fungsi, selain mengajarkan ilmu pengetahuan agama juga menjadi tempat mendidik sikap patriotisme bagi para pemuda, sekaligus menjadi tempat latihan militer untuk menghadapi penjajah Hindia Belanda (Hadi, 2014).

Ketika Indonesia merdeka, Aceh memperoleh keistimewaan dan dalam rangka mengisi keistimewaan pendidikan di Aceh dilakukan melalui perwujudan sistem pendidikan yang integral yang memberi ruang seluas-luasnya untuk internalisasi nilai-nilai Islam dalam keseluruhan proses pendidikan pada semua jenis dan jenjangnya. Namun upaya ini kemudian kandas di tengah jalan, karena minimnya komitmen pemerintah pusat untuk mengakomodir dan memfasilitasi aspirasi masyarakat Aceh. Perkembangan pendidikan untuk mengintegrasikan kurikulum pendidikan di tingkat Dasar, sebagai manifestasi keistimewaan pendidikan di Aceh akhirnya juga mengalami nasib yang sama dengan keistimewaan Aceh. Terlebih dengan di sahkannya Undang-Undang No. 2 tahun 1989 Tentang Sistem pendidikan nasional. Implikasi dari Undang-Undang No. 2 tahun 1989 telah mengeleminir keistimewaan Aceh yang mempunyai otonomi dalam menentukan kebijakan pendidikan. Meskipun demikian, para pemimpin Aceh tidak berdiam diri untuk mengisi keistimewaan Aceh dalam pendidikan. Hal ini di tandai dengan diresmikannya wadah yang menjadi lembaga ‘penggodok kebijakan’ dalam mengisi keistimewaan pendidikan di Aceh. Pada tahun 1990, pemerintah Daerah Istimewa Aceh meresmikan berdirinya Majelis Pendidikan Daerah (MPD) (Musanna, 2009). Secara garis besar dapat dinyatakan bahwa perkembangan lembaga pendidikan Islam di Aceh pasca kemerdekaan tetap merujuk pada perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia pada umumnya.

3. Lembaga Pendidikan Islam di Pidie

Perkembangan Lembaga pendidikan Islam di Pidie tidak jauh berbeda dengan di daerah lainnya yang ada di Aceh. Secara umum, perkembangan lembaga pendidikan Islam di Pidie dimulai dari meunasah, masjid dan dayah yang hanya mengajarkan ilmu agama. Kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan modern yaitu madrasah yang ikut mengajarkan ilmu atau materi yang bersifat umum. Layaknya Aceh secara umum, perkembangan pendidikan Islam yang terjadi di Pidie juga merupakan sesuatu yang integral dengan kontes Aceh di mana sebelum era lembaga pendidikan madrasah, masjid, meunasah, dan dayah telah terlebih dahulu hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ketika lembaga pendidikan madrasah semakin mengemuka, hal tersebut juga terjadi di Pidie. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1940 telah berdiri Madrasah di Pidie yaitu Madrasah Sa'adah Adabiyah milik Jam'iyah Diniyah pimpinan T. Daud Beureuh, tepatnya di Belang Paseh Sigli (Farid, 2017). Juga sebagaimana Aceh pada umumnya, pasca kemerdekaan perkembangan lembaga pendidikan Islam di Pidie juga bergantung pada regulasi nasional yang tertuang dalam peraturan pemerintah dan tunduk pada sistem pendidikan nasional. Namun demikian, lembaga pendidikan tradisional yang telah ada sebelumnya seperti meunasah dan dayah tetap eksis dan terus berubah menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat.

Jika berkaca pada aspek historis, eksistensi pendidikan Islam di Pidie telah memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan masyarakat Pidie secara umum. Meski pendidikan Islam modern telah mendominasi, tetapi lembaga pendidikan tradisional juga masih tetap eksis di masyarakat. Selain menempuh pendidikan formal di sekolah dan madrasah, masyarakat Pidie tetap mengkaji ilmu agama di meunasah dan dayah yang tersebar di setiap Gampong yang ada di kabupaten Pidie. Berikut ini penulis deskripsikan secara singkat perkembangan lembaga pendidikan Islam di Aceh dan Pidie secara umum:

Meunasah

Secara bahasa Meunasah berasal dari kata Arab yaitu Madrasah yang berarti tempat belajar (Syadli, 2003). Secara fisik, Meunasah merupakan satu bangunan yang terdapat di setiap Gampong yang digunakan sebagai tempat berdiskusi dan membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan. Di samping itu ia juga menjadi

tempat bermalam para anak-anak muda serta orang lelaki yang tidak mempunyai istri. Setelah Islam mapan di Aceh dan Pidie, meunasah menjadi tempat Shalat bagi masyarakat dalam satu Gampong. Dalam perkembangannya lebih lanjut, meunasah bukan hanya berfungsi sebagai tempat beribadat saja, melainkan juga sebagai tempat pendidikan, tempat pertemuan, bahkan juga sebagai tempat transaksi jual beli, terutama barang-barang tak bergerak. Selain itu, meunasah, sama halnya dengan surau di Minangkabau, juga berfungsi sebagai tempat menginap para musafir, tempat membaca hikayat, dan tempat mendamaikan jika ada warga kampung yang bertikai (Abdullah, 1980).

Syadli (2003) dalam kajiannya menceritakan bahwa meunasah merupakan lembaga pendidikan Islam terendah, di mana yang belajar di meunasah umumnya anak laki-laki yang umumnya di bawah umur. Sedangkan untuk anak perempuan pendidikan diberikan di rumah guru. Pendidikan di Meunasah ini dipimpin oleh Tengku Meunasah. Sedangkan pendidikan untuk anak perempuan diberikan oleh tengku perempuan yang disebut Tengku Inong. Dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak, Teungku meunasah dibantu oleh beberapa orang muridnya yang lebih cerdas. Lama pendidikan di Meunasah tidak ada pembatasan tertentu. Umumnya pendidikan berlangsung selama dua sampai sepuluh tahun. Pengajaran umumnya berlangsung malam hari. Materi pelajaran dimulai dengan membaca al-Qur'an yang dalam bahasa Aceh disebut Beuet Qur'an. Di samping itu diajarkan pula pokok-pokok agama seperti rukun iman, rukun Islam dan sifat-sifat Tuhan. Selain itu diajarkan pula rukun sembahyang dan rukun puasa serta zakat. Tak ketinggalan, pelajaran menyanyi juga diajarkan, terutama nyanyian yang berhubungan dengan agama yang dalam bahasa Aceh disebut dike atau seulaweut (dari zikir atau selawat). Keberadaan meunasah sebagai lembaga pendidikan tingkat dasar sangat mempunyai arti di Aceh. Semua orang tua memasukkan anaknya ke meunasah. Dengan kata lain semua anak Aceh tidak ada yang tidak mengecap pendidikan meunasah ini. Dengan kata lain meunasah merupakan madrasah wajib belajar bagi masyarakat Aceh masa lalu.

Dayah

Istilah dayah berasal dari bahasa Arab Zawiyah yang berarti pojok, sudut, bagian dari satu tempat/bangunan. Istilah Zawiyah digunakan di Mekah untuk

menunjukkan tempat dimana seorang ulama Masjidil Haram biasanya memberikan pelajaran. Tempat yang dipilih biasanya di pojok Masjidil Haram. Di sini para murid duduk melingkar mengelilingi guru untuk mendapatkan pelajaran dari ulama. Setelah agama Islam masuk ke Aceh, diiringi pula oleh ulama-ulama yang datang ke Aceh, tradisi ini diterapkan sebagaimana yang ada di Masjidil Haram. Sesampainya di Aceh, istilah Zawiyah berasimilasi dengan lidah Aceh, sehingga berubah bunyi menjadi dayah (Syadli, 2003). Berbeda dengan meunasah, dayah ini didatangi khusus oleh orang dewasa yang sudah mempunyai pengetahuan dasar tentang keislaman, para penguasa, bahkan juga oleh para ulama. Dalam perkembangan selanjutnya banyak orang berdatangan untuk belajar di dayah. Mereka yang datang bukan saja berasal dari kampung yang berdekatan, tetapi juga datang dari daerah-daerah di luar Aceh. Maka untuk bermalam murid yang datang dari jauh ini, dibangunlah di sekitar dayah tersebut bilik-bilik yang dalam bahasa Aceh disebut rangkang. Dengan demikian dayah ini sudah mempunyai 3 unsur utama yakni mesjid, tempat belajar, dan rangkang tempat bermalam, sehingga ia mempunyai kesamaan dengan pesantren di Jawa.

Dayah sebagai pendidikan formal tidak terdapat di setiap Gampong sebagaimana halnya meunasah. Dayah ini terdapat pada setiap mukim. Mukim adalah merupakan gabungan dari beberapa Gampong yang penduduknya melakukan salat Jumat dalam satu mesjid yang sama. Pembagian wilayah dengan bentuk mukim ini ditetapkan pertama kali oleh Sultan Iskandar Muda (Syadli, 2003). Dalam perkembangannya, Dayah di Pidie dan Aceh mengalami perubahan menjadi beberapa lembaga pendidikan Islam terpadu dan Modern. Dayah-Dayah ini resmi membuka madrasah dan sekolah Islam. Tetapi Dayah tradisional (salafiah) masih mempunyai tempat tersendiri di masyarakat Aceh. Sehingga Dayah di Aceh masih sangat identik dengan lembaga pendidikan tradisional (Marzuki, 2011).

Madrasah

Ketika masyarakat Aceh mendorong anaknya belajar agama ke luar Aceh seperti ke Minangkabau, Jawa, dan Mesir, di sana umumnya mereka memasuki sekolah-sekolah yang dikelola oleh muslim modernis, seperti sekolah Thawalib di Minangkabau, Sekolah Muhammadiyah di Jawa, dan yang belajar ke Mesir juga dipengaruhi oleh aliran modernis di sana. Maka setelah pulang ke Aceh mereka

menjadi pembaharu dan mendirikan sekolah modern yang disebut madrasah. Madrasah-madrasah yang didirikan itu antara lain adalah sekolah Teungku Abdul Wahab di Seulimeum, didirikan tahun 1926, Madrasah al-muslimin Peusangan milik Teungku Abdurrahman. Madrasah Saadah Adabiah milik Teungku M. Daud Beureuh, yang didirikan pada tahun 1931 di Blang Paseh, Pidie. Selain itu ada juga sekolah agama yang berafiliasi dengan sekolah-sekolah agama di luar Aceh, misalnya, Madrasah al-Irsyad yang didirikan tahun 1927 di Lhokseumawe berafiliasi dengan Madrasah al-Irsyad di Surabaya, sedangkan madrasah Thawalib di Tapak Tuan yang didirikan tahun 1928, berafiliasi dengan sekolah yang sama di Minangkabau. Selain itu ada sekolah yang didirikan oleh seorang ulaebalang Teuku M. Daud Panglima Polem, bernama Madrasah Iskandar Muda (Syadli, 2003). Pertikaian ini akhirnya melahirkan PUSA. Salah satu keputusan penting dari pertemuannya adalah penyesuaian kurikulum umum ke dalam sekolah-sekolah agama. Dengan demikian perbedaan pendapat menjadi berkurang. Akan tetapi dalam menghadapi suasana, ini, dayah mengambil dua sikap. Ada dayah yang berubah menjadi madrasah di samping itu masih banyak dayah yang tetap mempertahankan ketradisionalannya. Selain itu sikap masyarakat pun berubah. Setelah berdiri madrasah, perhatian sebahagian besar masyarakat tertuju kepada madrasah, bahkan murid-murid dayah sebahagian belajar ke madrasah.

Setelah Indonesia merdeka, dan setelah terjadi penegerian Madrasah, maka institusi pendidikan tradisional ini cenderung menjadi sekolah swasta, ada yang tetap dengan ketradisionalannya, dan ada pula yang mengambil corak modern. Saat ini, madrasah yang ada berkembang Kabupaten Pidie dibagi dalam empat tingkatan dengan jumlah saat ini sebanyak 161 lembaga (Seksi Penmad Kemenag Pidie, 2021), yang terdiri :

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri	53 Madrasah
2. Madrasah Ibtidaiyah Swasta	8 Madrasah
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri	13 Madrasah
4. Madrasah Tsanawiyah Swasta	24 Madrasah
5. Madrasah Aliyah Negeri	8 Madrasah
6. Madrasah Aliyah Swasta	14 Madrasah
7. Raudhatul Athfal	39 Madrasah

Sebagai contoh perkembangan Madrasah di Kabupaten Pidie adalah Madrasah Aliyah Negeri 1 Pidie yang mempunyai sejarah Panjang mulai dari pada tahun 1970. Madrasah Aliyah Negeri 1 Pidie yang kemudian disingkat menjadi MAN I Pidie pada awalnya adalah Sekolah Menengah Islam Atas Swasta (SMI/SMIA) yang kemudian berubah menjadi Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN) yang didasarkan pada Surat Yayasan SMI/SMIA cabang Kabupaten Pidie No.006/LMR/1969 tentang usul penegerian Sekolah Menengah Islam Atas Swasta Kabupaten Pidie, maka pada tanggal 19 Januari 1970 dinegerikanlah SMIA Swasta Sigli Kabupaten Pidie menjadi Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN) Sigli Kabupaten Pidie dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1970 Nomor STC.003/KPT/0170 yang ditandatangani oleh K.H. M. Dachlan yang menjabat Menteri Agama kala itu. Selanjutnya, pada Tahun 1978 MAAIN berubah menjadi MAN I Sigli di bawah kepemimpinan Kepala Madrasah Bapak Drs. M. Yahya Arsyad yang menjabat sejak tahun 1978 s.d 1983. Terakhir, pada tanggal 17 November 2016 MAN I Sigli kembali berubah nama menjadi MAN I PIDIE berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 670 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Aceh (Wardinur & Mutawally, 2019).

D. PENUTUP

Perkembangan lembaga pendidikan Islam di Aceh dan Pidie pada khususnya tidak bisa dilepaskan dari aspek historis. Secara struktural, lembaga pendidikan Islam di Pidie saat ini tidak berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia pada umumnya. Meski telah mengalami pelembagaan yang resmi dan mengacu pada peraturan pemerintah, lembaga pendidikan Islam di Pidie masih bisa dilacak akar sejarahnya. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan lembaga pendidikan Islam Pidie berjalan beriringan dengan perubahan-perubahan pada lembaga pendidikan di Indonesia secara umum karena Pidie merupakan bagian integral dari negara kesatuan republik Indonesia. Lembaga pendidikan Islam di Pidie secara bertahap berubah menjadi lembaga pendidikan modern, tetapi tetap mempertahankan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam warisan sejarah Aceh. Sehingga, meskipun madrasah

telah eksis dan mendominasi sebagai lembaga pendidikan Islam, namun setiap anak yang lahir di Aceh masih tetap mengenyam pendidikan di meunasah dan dayah-dayah tradisional yang tersebar di seluruh Gampong yang ada di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. (1980). *Perkembangan Tasawuf dan Tokoh-tokohnya di Nusantara*. Al-Ikhlâs.
- Azra, A. (2002). *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*. Mizan.
- Badwi, A., & Al-rasyidin, K. (2017). Pendidikan Islam pada Periodeisasi Khulafaul Al-Rasyidin, pada masa Nabi, Negara Islam. *Journal-Uim-Makassar*, 3, 134–142.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Farid, E. K. (2017). Wacana Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia: Pendekatan Historis Dan Sosiologis. *Dirosat : Journal of Islamic Studies*, 2(2), 183–208. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v2i2.62>
- Fitrah, M., & Luthfiah. (2018). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak. [https://books.google.co.id/books?id=UVRtDwAAQBAJ&pg=PA156&dq=objek+penelitian&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwia19ProKLpAhUEYysKHQciB2QQ6AEIPTAD#v=onepage&q=objek penelitian&f=false](https://books.google.co.id/books?id=UVRtDwAAQBAJ&pg=PA156&dq=objek+penelitian&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwia19ProKLpAhUEYysKHQciB2QQ6AEIPTAD#v=onepage&q=objek%20penelitian&f=false)
- Hadi, A. (2014). Dinamika Sistem Institusi Pendidikan Di Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(3), 179–194.
- Hafiddin, H. (2015). Pendidikan Islam pada Masa Rasulullah. *Journal.Uinsgd*, 2015, 17–30.
- Haidari, A., Mastuki, & Saha, M. I. El. (2004). *Pesantren Dalam Cakrawala Modern* (Mojeeb El). Diva Pusataka Jakarta.
- Ikramatoun, S., Amin, K., Darwin, D., & Halik, H. (2021). Iron Cage Birokrasi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologis. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 6(1), 18-29
- Kadir, I. (2010). Sejarah Pendidikan Islam. *Akademia*, 1–253.
- Kasi PDPONTREN. (2021). *Data Pondok Pesantren di Kabupaten Pidie*. Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pidie.
- Maftuh. (2009). SEJARAH PERKEMBANGAN MADRASAH. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Yogyakarta.
- Mahmud. (2006). *Model model Pembelajaran di Pesantren* (Khoiron Du). Media Nusantara.
- Marzuki, M. (2011). Sejarah Dan Perubahan Pesantren Di Aceh. *Millah*, 11(1),

221–233. <https://doi.org/10.20885/millah.vol11.iss1.art11>

- Musanna, A. (2009). Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Dalam Konteks Pendidikan Di Aceh. *Jurnal Penelitian*, 10(2), 1–12.
- Mustaqim, M. (2015). Pengilmuan Islam dan Problem Dikotomi Pendidikan. *Jurnal Penelitian*, 9(2), 255. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i2.1321>
- Posha, B. Y. (2015). Perkembangan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan. *Historia*, 3(2), 75. <https://doi.org/10.24127/hj.v3i2.84>
- Rahman, K. (2018). Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbiyatuna*, 10(1), 279–288. <http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2014.05.023%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gie.2018.04.013%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29451164%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC5838726%250Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.gie.2013.07.022%250>
- Republika. (2020). *Cordoba, Riwayat Kejayaan dan Keruntuhannya* | *Republika Online*. <https://www.republika.co.id/berita/qe3rnj430/cordoba-riwayat-kejayaan-dan-keruntuhannya>
- Seksi Penmad Kemenag Pidie. (2021). *Data Madrasah Kabupaten Pidie*.
- Solihin, M. (2015). Kapitalisme Pendidikan (Analisis Dampaknya Terhadap Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa). *Nur El-Islam*, 2(2), 56–73.
- Sufi, R., & Wibowo, A. B. (2009). *Pendidikan di Aceh dari Masa ke Masa*. Badan Arsip dan Perpustakaan NAD.
- Syadli. (2003). Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh: Ulama, Meunasah dan Rangkang. *Al-Qalam*, 20(96), 125–142.
- Wardinur, W., & Mutawally, F. (2019). Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Pemanfaatan Teknologi sebagai Media Pendukung Pembelajaran di MAN 1 Pidie. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 13(2), 167–182. <https://doi.org/10.24815/jsu.v13i2.16422>